

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Depok

2.1.1 Kondisi Geografis

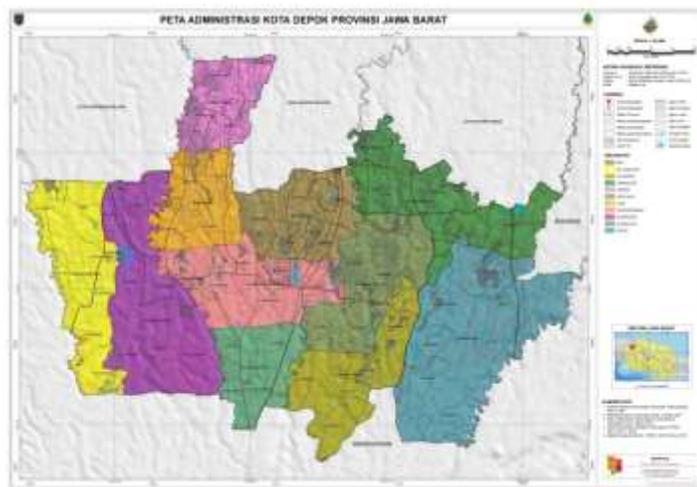
Kondisi geografis adalah keadaan suatu daerah atau wilayah yang dilihat berdasarkan kondisi nyatanya di muka bumi. Kondisi geografis memuat penjelasan tentang kondisi yang berkaitan dengan aspek-aspek geografis dari suatu wilayah. Aspek yang dimaksud diantaranya meliputi letak atau posisi, luas, relief, hingga titik koordinat dalam peta.

Letak geografis Kota Depok terletak pada koordinat di Lintang antara 06o 19' 00" – 06o 28' 00" LS dan di Bujur antara : 106o 43' 00" – 106o Kota Depok adalah Kota dengan dataran rendah. Kota Depok sendiri mempunyai wilayah yang cukup strategis, Kota Depok diapit oleh Kabupaten/Kota besar lainnya seperti DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Adapun batas administrasi Kota Depok adalah:

- a. Sebelah Utara : Prov. DKI Jakarta dan Kab. Tangerang (Prov. Banten)
- b. Sebelah Selatan : Kab. Bogor (Prov. Jawa Barat)
- c. Sebelah Barat: Kab. Bogor (Prov. Jawa Barat) dan Kab. Tangerang (Prov. Banten)
- d. Sebelah Timur : Kab. Bekasi dan Kab. Bogor (Prov. Jawa Barat)

Berdasarkan Publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam judul “Depok Dalam Angka 2022” secara geografis luas wilayah Kota Depok adalah 200,29 km², Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas wilayah mencapai 33,26 km² , atau 16,61 persen dari luas keseluruhan Kota Depok dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Cinere dengan total luas wilayah hanya mencapai 10,55 km² dengan total wilayah 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

Gambar 2.1 Peta Pembagian Administrasi Kota Depok



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Kota Depok dalam hal administrasi pemerintahan terdapat 11 (sebelas) Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda beda, dengan rincian sebagai berikut (BPS, 2021) :

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2021

Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan
Sawangan	Sawangan	26,19	7
Bojongsari	Bojongsari	19,30	7
Pancoran Mas	Pancoran Mas	18,03	6
Cipayung	Cipayung	11,45	5
Sukmajaya	Sukmajaya	17,35	6
Cilodong	Cilodong	16,19	5
Cimanggis	Cimanggis	21,58	6
Tapos	Tapos	33,26	7
Beji	Beji	14,56	6
Limo	Limo	11,84	4
Cinere	Cinere	10,55	2
Kota Depok		200,29	63

(Sumber: BPS Kota Depok, 2022)

2.1.2 Kondisi Demografis

Kependudukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penduduk seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pembagian penduduk menurut usia dan wilayah, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Jumlah penduduk Kota Depok berjumlah 2.484.186 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 747.621 jiwa penduduk jika dibandingkan dengan hasil survei BPS pada tahun 2010. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki laki sebesar 113.507 jiwa dan jumlah penduduk dengan kelamin perempuan sebanyak 107.114 jiwa, dengan kata lain rasio jumlah penduduk laki kali sebesar 50,46% dan rasio jenis kelamin perempuan sebesar 49,53% (BPS, 2021). selain itu terdapat 37.332 penduduk yang bermigrasi ke Kota Depok dan juga terdapat 35.633 Jumlah penduduk yang bermigrasi keluar Depok (BPS, 2021). Pada tahun 2021, terdapat

4.169 orang yang sedang mencari kerja atau *job seeker*, dengan kata lain tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok berada pada angka 9,76%.

Terkait dengan penyebaran penduduk, Kecamatan Tapos merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 267.000 penduduk dengan kepadatan penduduk mencapai 8047 jiwa/km² pada tahun 2021. Walaupun Kecamatan Tapos memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun Kecamatan Cipayung Merupakan wilayah terpadat dengan rata rata kepadatan mencapai 15.371 jiwa/km². Sementara wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Cinere dengan jumlah penduduk mencapai 101.700 jiwa penduduk.

Tabel 2.2 Data Jumlah Penduduk

No.	Kecamatan Administrasi	Jumlah			
		Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk per Tahun (%)	Kepadatan (/km ²)	RJK
1.	Sawangan	184.900	4,47%	7.060	104
2.	Bojongsari	134,340	3,63%	7.220	103
3.	Pancoran Mas	247.850	1,57%	13.746	101
4.	Cipayung	176.000	3,45%	15.371	102
5.	Sukmajaya	253.810	0,68%	14.629	99
6.	Cilodong	172.550	3,48%	10.658	103
7.	Cimanggis	251.250	0,12%	11.689	103
8.	Tapos	267.630	2,17%	8.047	102
9.	Beji	171.780	0,04%	11.798	102
10.	Limo	118.470	3,19%	10.006	102
11.	Cinere	101.350	-0,40%	9.607	100
Jumlah/Rata-Rata		2.056.400	1.92	10.415	102

Sumber : BPS Kota Depok, 2022

2.2 Profil Dinas Kehutanan dan Kebersihan Kota Depok

Menurut Peraturan Daerah Kota Depok No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Dinas Kebersihan dan Kehutanan ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe A yang ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah wajib bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok adalah suatu Dinas organisasi bentukan Pemerintah Kota Depok yang bergerak di bidang Kebersihan, Tata Kelola Konservasi, pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan serta

pengawasan dan penataan hukum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 34,5 Tapos Depok - Jawa Barat.

2.2.1 Visi Organisasi

Visi Organisasi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan oleh seluruh anggota organisasi. Visi berimplikasi dengan arah yang ingin dicapai oleh instansi agar dapat berjalan secara produktif dan inovatif. Aspek-aspek yang mendasari penetapan visi organisasi ialah bahwa setiap organisasi harus memiliki arah yang jelas untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dalam konteks ini, visi yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Kehutanan Kota Depok, yaitu

“Terciptanya Lingkungan Hidup yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera”

2.2.2 Misi Organisasi

Misi organisasi merupakan serangkaian upaya yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai bentuk tindak lanjut dari visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi, seluruh anggota organisasi beserta pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) diharapkan dapat memahami posisi dan peran organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun misi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Kehutanan Kota Depok untuk mencapai visi organisasi, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berWawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan WaliKota Nomor 71 tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas dan fungsi, yaitu: (a) Perumusan Kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (b) Pelaksana kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. (d) pelaksanaan administrasi dinas, dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh waliKota terkait dengan tugas dan fungsinya (Peraturan WaliKota Nomor 71 Tahun 2016).

2.2.4 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

Isu Strategis adalah sebuah keadaan yang harus dilihat dan diperhatikan dalam melakukan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan akan berdampak secara signifikan bagi sebuah entitas di masa mendatang. Dalam konteks ini, isu strategis Dinas Kebersihan dan Kehutanan Kota Depok berkaitan dengan hambatan-hambatan

yang belum mampu ditangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya, hambatan tersebut dapat membawa dampak jangka panjang bagi pelaksanaan pembangunan. Adapun isu strategis Dinas Kebersihan dan Kehutanan Kota Depok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 yang berisikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026:

a. Pencemaran Lingkungan

1. Degradasi lingkungan, menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/ atau industri
2. Semakin banyaknya jumlah/kegiatan usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.
3. Semakin banyaknya jumlah penduduk, perumahan dan permukiman menyebabkan bertambahnya beban pencemaran daya dukung tanah dan air;

b. Pengelolaan Sampah

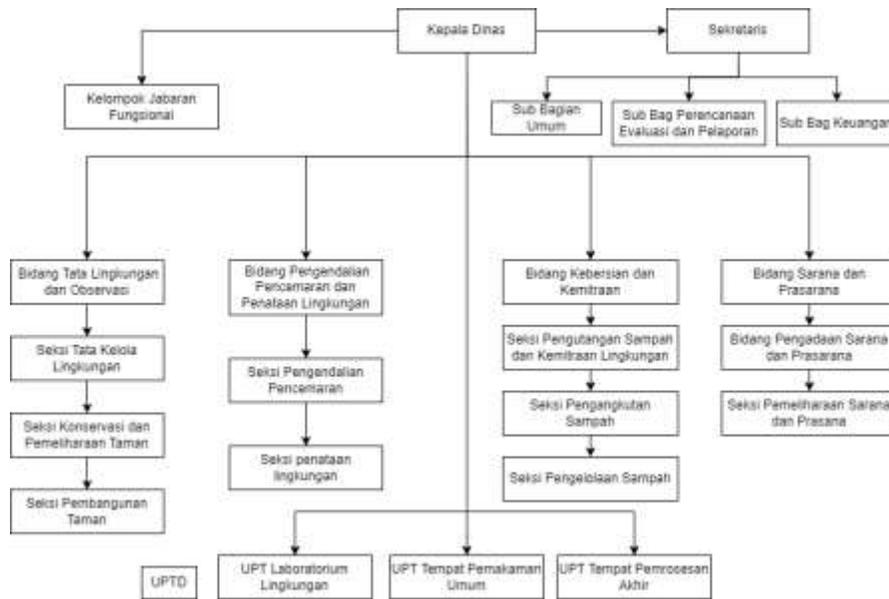
1. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berakibat semakin meningkatnya laju timbulan sampah;
2. Jumlah sampah yang terus meningkat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di pemrosesan di TPA, Kota Depok belum memiliki lahan alternatif untuk pemrosesan sampah, dan perlunya pemrosesan pengolahan sampah dengan teknologi di TPA;

3. Belum adanya penanganan sampah berbasis kawasan.
4. Belum terlaksananya penanganan pemilahan sampah;
5. Pengelolaan limbah medis dengan penanganan khusus.

2.2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan definisi mengenai hierarki dalam suatu organisasi. Definisi yang dimaksud berkaitan dengan komponen Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki posisi, tugas, dan fungsi dalam organisasi terkait. Pada konteks ini, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terdiri dari:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Sekretaris membawahi

3 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bag Umum
- b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bag Keuangan

3. Bidang Tata Lingkungan

- a. Seksi Tata Kelola Lingkungan
- b. Seksi Konversasi dan Pemeliharaan Taman
- c. Seksi Pembangunan Taman

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran
- b. Seksi Penataan Lingkungan

5. Bidang Kebersihan dan Kemitraan

- a. Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan
- b. Seksi Pengangkutan Sampah
- c. Seksi Pengelohan Sampah

6. Bidang sarana dan Prasarana

- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

7. UPTD

- a. UPT Laboratorium Lingkungan
- b. UPT Tempat Pemakaman Umum

c. UPT Tempat Pemrosesan Akhir

2.3. Profil Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim adalah sebuah program yang bersifat nasional dengan tujuan untuk pengendalian iklim berbasis komunitas yang diinisiasikan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Kampung Iklim dilaksanakan mulai dari tingkatan tapak yaitu Rukun Warga/Dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan/desa, Program Kampung Iklim dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (*party*) dengan *Non Party Stakeholder*

Upaya adaptasi dan mitigasi terus dilakukan guna masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini upaya adaptasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam melaksanakan Program Kampung Iklim yaitu :

- a. Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor
- b. Peningkatan ketahanan pangan
- c. Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut rob, intrusi air laut, abrasi, erosi, gelombang tinggi
- d. Pengendalian penyakit iklim; dan
- e. Kegiatan-kegiatanlainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terhadap ancaman perubahan iklim

Selain upaya adaptasi, ada juga upaya mitigasi dalam melaksanakan Program Kampung Iklim, yaitu upaya pencegahan penyebab perubahan iklim dan juga upaya

untuk mengurangi kegiatan yang dapat meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca, upaya upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan perilaku hemat energi, transportasi hijau, pengelolaan sampah, penanaman pohon serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat.

Lokasi Program Kampung Iklim harus mempunyai 3 (tiga) aspek didalamnya, yaitu :

- a. Adanya aksi adaptasi menanggulangi dampak perubahan iklim yang telah terjadi maupun yang belum terjadi (antisipasi)
- b. Adanya aksi mitigasi mengurangi gas rumah kaca yang dikeluarkan maupun dengan menyerap kembali yang sudah ada di udara lepas
- c. Adanya kelompok masyarakat yang merupakan penggerak dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi.

2.3.1 Data Daerah Kota Depok yang menerapkan Program Kampung Iklim

Untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim, maka dilaksanakan Program Kampung Iklim yang bertujuan untuk mendorong masyarakat Kota Depok untuk ikut serta berpartisipasi dalam penanggulangan perubahan iklim. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok telah melaksanakan Program Kampung Iklim pertama kalinya di tahun 2012, RW 24 Kelurahan Abdijaya merupakan daerah pertama di Kota Depok yang melaksanakan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim di Kota Depok sampai dengan 2023 sudah

mempunyai 5 Kelurahan yang telah melaksanakan Program Kampung Iklim, antara lain:

Tabel 2.3 Data Base Persebaran Lokasi Program Kampung Iklim Kota Depok

No.	Kelurahan	RW
1.	Kelurahan Ratujoya	RW 05, RW 06 dan RW 07
2.	Kelurahan Rangkapanjaya	RW 11
3.	Kelurahan Baktijaya	RW 10 dan RW 19
4.	Kelurahan Abadijaya	RW 08
5.	Kelurahan Sukamaju	RW 10

(Sumber : Silau.Depok.go.id)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kota Depok terdapat 8 Lokasi Program Kampung Iklim dari 5 Kelurahan yang berbeda.